

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 dalam Santoso, 2013).

Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah di Indonesia banyak mengalami hambatan, apalagi bila sistem pembangunan ekonomi masih bersifat sentralistik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menetapkan otonomi daerah mulai tahun 2001 sampai saat ini. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini didasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat. Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahannya dalam mengelola daerahnya, sehingga berada dalam posisi lebih baik, untuk memobilisasi sumber daya secara mandiri serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Otonomi daerah merupakan upaya pembangunan daerah dalam pengambilan keputusan daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Salah satu pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal, yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber PAD berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Kuncoro (2004) dalam Santoso (2013) menemukan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari

APBN yang dialokasikan dengan tujuan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kemajuan perekonomian di dalam suatu daerah dengan ditunjukkan oleh perubahan output. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional adalah tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian (Azzahra, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengambil judul tentang **“PENGARUH PAD, DAK, DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2011 – 2014”**.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2014?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2014?

3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2014
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2014
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2011-2014

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dalam upaya mendorong perekonomian daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang adil dan makmur.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan tema yang sama.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah. Tujuan serta sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, menggambarkan kerangka Pemikiran dan menarik hipotesis.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

BAB ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, serta jenis dan sumber data serta menjelaskan metode penelitian yang dipakai dan data yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

BAB ini menjelaskan akan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

5. BAB V : PENUTUP

BAB ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.